

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Agribisnis

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

Pengertian Agribisnis menurut Para Ahli :

1. Pengertian agribisnis menurut Davis & Golberg tahun 1957 memberikan suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang pertanian modern menghadapi milenium ke 3. Agribisnis merupakan suatu sistem, bila akan dikembangkan harus terpadu dan selaras dengan semua subsistem yang ada didalamnya.
2. Pengertian Agribisnis menurut Soehardjo (1997) memandang Agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem. Sistem tersebut akan berfungsi baik apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem.
3. Pengertian Agribisnis Menurut Sjarkowi dan Sufri (2004) Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi perusahaan input pertanian dan atau perusahaan produksi itu sendiri atau pun juga perusahaan pengelolaan hasil pertanian. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.
4. Pengertian Agribisnis Menurut Downey and Erickson (1987) Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Oleh karena itu, Downey dan Erickson (1987)

mendefinisikan agribisnis sebagai tiga sektor secara ekonomi saling berkaitan. Ketiga sektor agribisnis tersebut adalah (a) *the input supply sector*, (b) *the farm production sector*, dan (c) *the product marketing sector*.

5. Pengertian Agribisnis menurut Arsyad Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari matarantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistem yaitu, sub sistem usaha tani/ yang memproduksi bahan baku sub sistem pengolahan hasil pertanian dan sub sistem pemasaran hasil pertanian.
6. Pengertian Agribisnis menurut Austin Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen.
7. Pengertian Agribisnis menurut Drillon Agribisnis adalah sejumlah total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian, kegiatan yang dilakukan usahatani, serta penyimpanan, pengolahan dan distribusi dari produk pertanian dan produk-produk lain yang dihasilkan dari produk pertanian.
8. Pengertian Agribisnis menurut Cramer and Jensen Agribisnis adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks, meliputi : industri pertanian, industri pemasaran hasil pertanian dan hasil olahan produk pertanian, industri manufaktur dan distribusi bagi bahan pangan dan serat-seratan kepada pengguna/konsumen.
9. Pengertian Agribisnis menurut Soekartawi (1993) Agribisnis berasal dari kata agri dan bisnis. Agri berasal dari bahasa Inggris, agricultural (pertanian). Bisnis berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan.
10. Pengertian Agribisnis Menurut Wibowo dkk, (1994) Pengertian agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistem yaitu, sub sistem usaha tani/ yang

memproduksi bahan baku sub sistem pengolahan hasil pertanian, dan sub sistem pemasaran hasil pertanian.

2.2 Perjalanan Awal Agribisnis Menjadi Paradigma

Dalam konteks pembangunan pertanian “**Agribisnis**” adalah suatu paradigma. Agribisnis adalah paradigma baru yang telah dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pokok pembangunan di Indonesia. Di Indonesia agribisnis berkembang menjadi suatu paradigma setelah melalui berbagai pergolotan panjang. Perjalanan pemikiran dan konsep itu sampai menjadi paradigma telah melibatkan banyak orang dan banyak kelompok orang sehingga paradigma agribisnis dapat diterapkan dengan baik. Tentunya, setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pertanian Indonesia, akhirnya terbukti paradigma agribisnis dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pembangunan pertanian dan ekonomi nasional.

Dalam konteks pemikiran yang berkembang di dunia, agribisnis bukan sesuatu yang terlalu baru. Awalnya, paradigma agribisnis dikembangkan oleh dua ilmuwan dari Harvard University, yang merasa risau melihat lebarnya ke senjangan harga di tingkat petani (*farm gate price*) dengan harga ditingkat supermarket dan harga ditingkat konsumen. Selain itu kedua ilmuwan itu juga risau mengenai harga komoditas pertanian primer selalu jatuh pada saat panen. Sementara produk olahannya tetap tinggi.

Masalah jatuhnya harga komoditas primer sebelumnya jarang terjadi ketika komoditas pertanian primer belum melimpah dan masih kekurangan pasokan (*shortage*). Selanjutnya ketika produksi dapat dipacu dan ditingkatkan maka terjadi keberhasilan yang luar biasa dalam proses budidaya (*on farm*), akibatnya terjadilah kelebihan pasokan (*over supply*) sehingga harganya jatuh. Saat itulah paradigma peningkatan produksi pertanian yang semata-mata ditujukan untuk lebih menekankan pada peningkatan kapasitas produksi primer menimbulkan permasalahan baru.

Persoalan baru itu muncul ketika peningkatan produksi primer yang sebelumnya otomatis meningkatkan pendapatan produsen (petani) ternyata tidak lagi. Dalam suasana produksi berlebih, upaya meningkatkan produksi justru akan meningkatkan resiko kerugian, dari situlah lahir suatu paradigma baru pertanian yang disebut agribisnis.

2.2.1 Penerapan Agribisnis sebagai Paradigma Pembangunan Pertanian

Agribisnis merupakan cara baru melihat pertanian. Jika dahulu melihat secara sektoral sekarang intersektoral. Apabila dahulu secara subsistem maka sekarang melihat secara sistem. Jika dahulu dilihat secara terpisah-pisah saat ini harus terintegrasi dan holistik. Apabila agribisnis usaha tani dianggap sebagai subsistem maka ia tidak terlepas dari kegiatan agribisnis non usaha tani seperti agribisnis hulu, dan hilir. Jadi melalui sistem dan usaha agribisnis, pendekatan secara sektoral ke intersektoral, subsistem kepada sistem, terpisah ke integrasi, dan pendekatan dari hanya produksi ke bisnis.

Dalam model pengembangan agribisnis ada implikasi terjadi perubahan kebijakan di sektor pertanian. **Pertama**, produksi sektor pertanian harus lebih berorientasi kepada permintaan pasar, tidak saja domestik tetapi juga pasar internasional. **Kedua**, pola pertanian harus mengalami transformasi dari sistem pertanian subsistem yang berskala kecil dan pemenuhan kebutuhan keluarga ke usaha tani dalam skala yang lebih ekonomis. Hal ini merupakan keharusan, jika produk pertanian harus dijual kepasar dan sektor pertanian harus menyediakan bahan baku bagi sektor industri (Saragih 2004).

Bagi negara yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan memiliki keunggulan komparatif seperti Indonesia, maka agroindustri atau industrialisasi berbasis pertanian tropika hendaknya berbasis keunggulansumber daya pertanian (*Resources based* atau *agro based*). Beberapa prinsip pembangunan melalui pengembangan paradigma agribisnis adalah sebagai berikut :

1. Paradigma Agribisnis merupakan suatu model yang mencakup sistem dari kegiatan pra dan budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran serta sektor-sektor penunjangnya sebagai suatu sistem yang paling terintegrasi kuat satu dan lainnya serta sulit dipisahkan.
2. Berorientasi pasar (*market oriented*), yaitu menempatkan pendekatan *supply-demand* sebagai pertimbangan utama dalam proses produksi dan distribusi untuk mengatasi kegagalan pasar yang bisa merugikan produsen (petani) maupun konsumen (baik industri maupun rumah tangga).
3. Menetapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu dengan memperhatikan kesinambungan *supply, demand*, dan daya dukung lingkungan untuk jangka waktu yang panjang.

4. Keterkaitan sistem produksi dengan pendukung yang efisien seperti (a) penyediaan input produksi (lahan, air, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja), (b) perbankan dan asuransi, (c) industri pengolahan, (d) penelitian (pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah), dan (e) transportasi (jalan, pelabuhan dan angkutan).
5. Dukungan sistem informasi. Tersedianya data yang akurat dan mudah didapat saat diperlukan. Data itu antara lain : iklim, teknologi, produksi, konsumsi, pasar dan harga.
6. Pada akhirnya yang melaksanakan proses produksi adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Orang atau kelompok orang itu dapat berupa individu, keluarga, organisasi koperasi atau perusahaan swasta/BUMN (sering disebut pemangku kepentingan/*stake holder*).

2.2.2 Usaha Tani Adalah Bisnis (*Farming is a Business*)

Para penganut agribisnis berpandangan bahwa usaha tani gurem atau skala besar, adalah suatu usaha bisnis atau *farming is a business enterprise*. Seperti usaha bisnis lainnya, **tujuan utama usahatani ialah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya** (Simatupang, 2003). Untuk itu, usaha tani haruslah **dikelola secara rasional** dalam arti menggunakan *input-output*. Dengan pandangan demikian maka perencanaan usahatani haruslah **berorientasi pada pasar output** dan dengan mempertimbangkan pasar *output* (Kasryno, Simatupang, dan Manurung 1993). Agar dapat mewujudkan semua itu maka penganut paradigma agribisnis berpandangan bahwa **petani adalah seorang manajer usaha bisnis yang otonom** dalam arti bebas mengambil keputusan berkaitan dengan penetapan jenis komoditas yang di usahakan, target volume atau skala komposisi *input* yang digunakan dalam dan proses produksi.

Pandangan bahwa usahatani adalah bisnis komersial adalah sesungguhnya yang menjadi dasar penggunaan kata agribisnis. Agribisnis berasal dari dua kata yaitu “**agrikultur**” dan “**bisnis**”. Berdasarkan makna kata-kata asal usulnya maka agribisnis berarti bisnis atau usaha komersial yang berkaitan dengan pertanian. Seperti yang diuraikan pada bagian berikut, agribisnis tidak hanya mencakup usahatani (*farming*) tetapi juga semua jenis usaha yang berkaitan dengan prasarana dan sarana produksi serta penanganan dan pengolahan hasil pertanian.

2.2.3 Perspektif Sistem Agribisnis

Penganut paradigma agribisnis berpandangan bahwa setiap usaha produksi komoditas pertanian memerlukan *input* langsung (*direct inputs*) dan prasarana penunjang serta kondisi pasar *input* dan *output* yang khas spesifik lokasi. Seperti usaha produksi komoditas pertanian, setiap usaha produksi *input* maupun pengolahan *output* usahatani memerlukan *input* dan prasarana penunjang serta kondisi pasar *input* dan *output* yang khas spesifik lokasi. Dengan demikian, kinerja usaha produksi *input* maupun pemasaran *output* usahatani.

Kondisi akses (volume, mutu, waktu, dan harga) petani terhadap suatu input langsung, berarti pula kinerja usahatani, sangat tergantung pada kinerja keseluruhan rantai pasok (*supply chain*) *input* tersebut, mulai dari ketersediaan faktor produksi primer, usaha produksi *input* langsung usahatani diterima oleh petani. Kinerja setiap simpul usaha dalam rantai pasok *input* tersebut (usaha pemasaran dan pengolahan *input* usahatani) saling bergantung satu sama lain, dan secara keseluruhan saling tergantung pula dengan kinerja usahatani. Oleh karena kinerjanya sangat bergantung pada kinerja usahatani, yakni sebagai konsumen akhir, maka **semua jenis usaha dalam rantai pokok *input* usahatani juga dikategorikan sebagai agribisnis atau bisnis yang berkaitan dengan pertanian.**

Dengan logika yang sama, kondisi pemasaran *output* usahatani, berarti pula kinerja usahatani, sangat bergantung pada kinerja keseluruhan rantai pasok *output* tersebut, mulai dari ketersediaan faktor produksi primer, usaha produksi *input* antara hingga *output* akhir diterima oleh konsumen. Kinerja setiap simpul usaha dalam rantai pasok *output* tersebut (usaha pemasaran dan pengolahan hasil pertanian) saling bergantung satu sama lain, dan secara keseluruhan saling tergantung pula dengan kinerja usahatani. Oleh karena kinerjanya sangat tergantung pada kinerja usahatani, yakni sebagai penyedia bahan baku primer, maka **semua jenis usaha dalam rantai pasok *output* usaha tani juga dikategorikan sebagai agribisnis atau bisnis yang berkaitan dengan pertanian.**

Selain kondisi akses terhadap *input* dan pemasaran *output*, kinerja usahatani (agribisnis secara umum) juga ditentukan oleh kondisi akses terhadap jasa layanan dan infrastruktur pendukung seperti penyedia modal usaha (lembaga finansial), penelitian, pengembangan dan penyuluhan teknologi,

manajemen bisnis dan informasi pasar, transportasi, telekomunikasi, perlindungan risiko, dan lingkungan usaha.

Dengan demikian yang disebut agribisnis tidak saja usahatani (*farming*), tetapi juga semua usaha dalam rantai pokok *input* maupun rantai pasok *output* (*farming-interlated interprise*). **Perpaduan saling tergantung seluruh usaha agribisnis yang berada dalam rantai pasok *input*, usahatani dan rantai pasok *output*, jasa layanan serta infrastruktur dan regulasi penunjang disebut sistem agribisnis.**

2.2.4 Strategi Manajemen Sistem Agribisnis [Agribusiness System Management]

Oleh kinerja usahatani sangat ditentukan oleh kinerja atau keberadaan dan relasi sinergis dari elemen-elemen sistem agribisnis di dalam mana usahatani tersebut menjadi elemen-elemen inti maka strategi yang tepat untuk menumbuh kembangkannya ialah dengan mengelolanya sebagai bagian integral dari pengelolaan sistem agribisnis tersebut. Strategi disebut **Manajemen Sistem Agribisnis** (*agribusiness System Management=ASM*). Prof. Bungaran Saragih menyebut strategi tersebut sebagai **Membangun Usaha dan Sistem Agribisnis**.

Dalam agribisnis pola industrial, setiap perusahaan agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi horizontal, tetapi memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (dari hulu hingga ke hilir) dalam satu kelompok usaha yang selanjutnya disebut sebagai **Unit Agribisnis Industrial (UAI)**.

Adapun karakter utama dari Unit Agribisnis Industrial adalah sebagai berikut :

- Lengkap secara fungsional (seluruh fungsi yang diperlukan dalam menghasilkan, mengolah, dan memasarkan produk pertanian hingga ke konsumen akhir (alur produk vertikal) dapat dipenuhi).
- Ikatan langsung secara institusional (hubungan diantara seluruh komponen atau anggota terjalin langsung melalui ikatan institusional/non pasar).
- Satu kesatuan hidup (kelangsungan hidup dan perkembangan setiap komponen atau anggota saling tergantung satu sama lain)
- Koperatif (setiap komponen atau anggota saling tergantung satu sama lain)

- Satu kesatuan tindak (seluruh komponen atau anggota melaksanakan fungsinya secara harmonis dan dalam satu kesatuan tindak).

Indikator kemampuan akhir (*performance*) yang harus dipenuhi ialah :

- Mampu menyesuaikan dan menjamin kualitas (mutu) produk pertanian yang dipasarkan seperti spesifikasi karakteristik yang di inginkan oleh konsumen akhir (*quality assurance*).
- Mampu mengadopsi teknologi paling mutakhir pada seluruh fungsi (proses) transformasi produk pada alur vertikal, mulai dari usahatani hingga industri pengolahan (modernisasi).
- Mampu tumbuh berkembang secara berkelanjutan atas kemampuan sendiri (kemandirian progresif).
- Mampu mengantisipasi, mengabsorpsi, dan menyesuaikan diri terhadap kunjungtur ekonomi (tangguh).
- Mampu menghadapi persaingan yang ketat di pasar dunia (memiliki keunggulan kompetitif).

2.3 Paradigma Pembangunan Pertanian

Paradigma agribisnis sebagai paradigma pembangunan maksudnya ialah penggunaan pokok-pokok pikiran perspektif agribisnis yang diuraikan diatas sebagai landasan teori dalam perumusan **kerangka konseptual** yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam perumusan strategi, kebijakan dan program **operasional** pembangunan pertanian. Paradigma pertanian adalah konsepsi teoritis yang berlaku secara umum di negara manapun bila asumsi yang melandasinya sesuai dengan realitas perkembangan sektor agribisnis di negara-negara tersebut. Kebijakan dan program operasional sebagai pelaksana dari paradigma agribisnis tersebut tentu bersifat spesifik negara dan spesifik wilayah.

Kerangka konseptual kebijakn pertanian berdasarkan paradigma agribisnis yang di uraikan diatas adalah sebagai berikut. **Pertama** , usahatani adalah adalah usaha bisnis. Usahatani berorientasi pada perolehan laba serta dikelola secara rasional dan otonom oleh petani. Pemikiran ini setidaknya mensyaratkan setidaknya dua prinsip dasar yang mesti dipenuhi kebijakan dan program operasional pembangunan pertanian :

1. Tujuan utama pembangunan pertanian adalah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan (pendapatan) petani.

2. Kebebasan dalam mengelola usahatani adalah hak azasi petani. Petani memiliki kebebasan dalam menetapkan komoditas yang di usahakan, skala usaha, teknologi dan input yang digunakan, pola pertanaman, pemanenan, dan pemanfaatan hasil usaha tani yan diperoleh.

Kedua, perspektif sistem agribisnis. usahatani adalah elemen inti dari sistem agribisnis yang meliputi subsistem pemasok input usahatani (hulu), pengolahan dan pemasaran hasil usahatani (hilir), jasa layanan penunjang, serta infrastruktur penunjang, termasuk norma standar dan regulasi agribisnis. pemikiran ini menimbulkan beberapa implikasi penting berkenaan dengan perumusan kebijakan pembangunan pertanian :

1. Masalah atau kendala usahatani tidak hanya berada pada usahatani (sektor pertanian) tetapi juga, bahkan kerap kali lebih parah, berada diluar usahatani (sektor nonpertanian). Kebijakan dan program pembangunan sektor pertanian. Kebijakan dan program pembangunan pertanian haruslah dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan semua kebijakan dan program Kementrian-Kementrian terkait dalam sistem agribisnis dan namanya lebih tepat disebut sebagai **kebijakan dan program pembangunan agribisnis**.
2. Dengan cakupan tugas dan kewenangan yang ada dari dulu hingga saat ini, kebijakan dan program terpadu pembangunan agribisnis tidak mungkin dapat dirancang dan dilaksanakan oleh Kementrian Pertanian. Untuk itu ada dua opsi yang dapat dipilih yaitu membentuk Kementrian Agribisnis atau membentuk **Forum Koordinasi Kebijakan Agribisnis** yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Ekonomi atau Menteri Perencanaan Pembangunan.

Ketiga, manajemen sistem agribisnis. agribisnis suatu sistem rantai pasok yang bersifat spesifik komoditas dan spesifik lokasi, suatu kesatuan tindak, dan dikelola oleh seorang manajer atau koordinator. Implikasi pandangan ini terhadap kebijakan dan program pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Satuan unit pengembangan dalam setiap program pembangunan usaha pertanian adalah satu unit rantai pasok yang secara spesifik disebut Unit Agribisnis Industrial
2. Bantuan fasilitas pemerintah lintas Kementrian haruslah dirancang dan dilaksanakan terpadu sebagai bagian dari Pengembangan Unit Agribisnis Industrial tersebut.

2.3.1 Strategi Pokok sebagai Operasional dari Paradigma Pembangunan Agribisnis

Profesor Bungaran Saragih menguraikan enam strategi pokok sebagai operasional dari paradigma pembangunan agribisnis, ialah sebagai berikut :

1. Pengembangan agroindustri sebagai penggerak sektor agribisnis
2. Pengembangan pemasaran melalui strategi segmentasi pasar dan aliansi pasar
3. Pengembangan sumber daya agribisnis, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia
4. Penataan dan pengembangan struktur agribisnis yang diarahkan untuk pengembangan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dan pengembangan organisasi bisnis petani
5. Pengembangan pusat pertumbuhan sektor agribisnis
6. Pengembangan infrastruktur agribisnis

2.3.2 Sumber Pertumbuhan dan Tahapan Pembangunan

Secara makro pertumbuhan dipengaruhi oleh dua hal yaitu, pergeseran dari sudut agregat permintaan (*aggregate demand*) dan agregat penawaran (*aggregate supply*). Dari sisi permintaan, sumber-sumber pertumbuhan berasal dari pasar (*market*) yaitu konsumsi masyarakat, investasi swasta, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan net ekspor (ekspor dikurangi impor). Namun demikian dari sudut ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang riil lebih cenderung melihat dari sudut penawaran. Demikian pula pertumbuhan atau perkembangan sektor pertanian atau secara khusus sistem agribisnis sangat terkait kepada perkembangan sub-subsektor pertanian lainnya. Terdapat dua faktor yang menggerakkan pertumbuhan suatu sektor ekonomi, yaitu peningkatan penawaran faktor-faktor produksi dan peningkatan produktifitas faktor produksi itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber pertumbuhan atau peningkatan output sangat ditentukan oleh empat komponen (Lipsey *et al* 1993):

1. Pertumbuhan tenaga kerja (*Labour force growth*). Ketersediaan tenaga kerja secara berkesinambungan ditambah dengan tingkat partisipasi yang tinggi akan menghasilkan peningkatan output suatu sektor ekonomi. Namun seperti yang disebutkan diatas selain jumlah, produktifitas mempengaruhi dan memiliki kontribusi yang cukup kuat. Maka dalam konteks ini, proporsi tenaga kerja terlatih (*skilled Labour*) dan tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled*

Labour) perlu mendapat perhatian, khususnya dalam pembangunan pertanian mengingat sebagian tenaga kerja disektor pertanian merupakan tenaga kerja tidak terlatih. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu proporsional dengan peningkatan output. Pada suatu fase dalam proses produksi akan terjadi kenaikan produksi tidak sebanding dengan penambahan tenaga kerja (*The Law of Diminishing Returns*).

2. Investasi pada sumber daya manusia (*investment in human capital*). Terdapat tiga aspek dalam *human capital* ini yaitu :
 - Peningkatan kesehatan dan *longevity of the population*.
 - Pelatihan sumber daya manusia sehingga menjadi tenaga kerja yang terlatih. Pelatihan atau edukasi sangat bergantung kepada suatu teknologi. Kehandalan teknologi tidak hanya menciptakan kapital fisik yang lebih produktif juga akan menghasilkan sumber daya manusia (*human capital*) yang lebih efektif .
 - Peranan *human capital* dalam menciptakan inovasi baru
3. Investasi kepada kapital fisik berupa pabrik, peralatan produksi, transportasi dan fasilitas telekomunikasi.
4. Perubahan teknologi (*technological change*). Perubahan teknologi ini merupakan dampak dari inovasi yang dihasilkan oleh *human capital*. Inovasi menciptakan produk-produk baru, cara menghasilkan produksi dan pola pengorganisasian sumber daya atau bentuk-bentuk organisasi bisnis.

2.3.3 Pertanian dan Tahap Perkembangan Ekonomi

Tingkat perkembangan pertanian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi secara keseluruhan (yang juga berimplikasi pada perkembangan sosial, politik, dan faktor lainnya). Pertanian dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan sebaliknya ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan pertanian. Hal ini telah dirumuskan oleh Lewis (1954) yang menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor saja, yaitu sektor pertanian (pedesaan) dan sektor industri. Perkembangan dari model Lewis, dan juga pemikiran Harold-Domar, Solow, dan Kaldor, menyatakan bahwa perkembangan ekonomi secara sederhana dapat dipandang masih cenderung pada pertanian dan pedesaan, sebaliknya jika jika kapital lebih dominan, maka yang akan diperbandingkan adalah produktivitas marginal tenaga kerja diantara kedua

sektor tersebut. Sektor dengan produktifitas marginal yang lebih tinggi akan memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi pula.

2.3.4 Tahap Perkembangan Agribisnis

Tahap pertama pengembangan agribisnis adalah bertumpu pada keunggulan komparatif berupa ketersediaan lahan yang cukup luas, jumlah tenaga kerja disektor pertanian yang masih besar dan didukung oleh agroklimat yang sesuai. Atau dengan kata lain input yang berupa sumber daya alam (*natural resource inputs*) memiliki kontribusi yang cukup besar dalam proses produksi di sektor pertanian (pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan). Output yang dihasilkan pada tahap pertama tidak dapat berkesinambungan ditinjau dari sudut pasar mengingat lemahnya kemampuan untuk bersaing dengan produk-produk lain. Disamping itu, secara ekonomi produk0produk yang dihasilkan pada tahap pertama tidak memberikan tambahan manfaat atau *value added* dari potensi pengembangan produk itu sendiri.

Pada **tahap kedua**, pembangunan sistem agribisnis di Indonesia akan digerakkan oleh kekuatan investasi (*investment-driven*) melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan (agroindustri) serta industri hulu, (agrokimia, agrootomotif, pembenihan dan pembibitan). Selain itu pembangunan sistem agribisnis khususnya peningkatan sumber daya manusia.

Tahap ketiga, tahap pembangunan sistem agribisnis berikutnya adalah tahap pembangunan agribisnis yang didorong oleh inovasi melalui peningkatan kemajuan teknologi pada setiap subsistem dari agribisnis untuk setiap kelompok agribisnis serta disertai dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia lebih lanjut sehingga tetap sinkron dengan perkembangan ekonomi yang ada. Pada tahap ini dicirikan oleh produktivitas yang tinggi dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada setiap subsistem agribisnis sehingga teknologi baru tetap dihasilkan sesuai dengan perubahan pasar. Pada tahap inovasi ini kemajuan bioteknologi, khususnya pada industri pembibitan atau pembenihan, teknologi dibidang agrokimia, teknologi dibidang agrootomotif, dan teknologi pengolahan (*processing*) menjadi tulang punggung pembangunan sistem agribisnis secara keseluruhan. Pada tahap inovasi, produk yang dihasilkan akan didominasi oleh produk-produk yang bersifat ilmu pengetahuan dan tenaga kerja yang terdidik (*knowledge intensive and skilled labour based*) sedemikian rupa sehingga makin memperbesar dan memperluas pangsa pasar

internasional yang dapat di kuasai atau dimasuki Indonesia. Selain itu, nilai tambah yang dinikmati Indonesia akan semakin besar.

Bila ketiga ini dapat dicapai sistem agribisnis Indonesia, maka perekonomian Indonesia akan beralih dari perekonomian yang berbasis agribisnis kepada perekonomian yang berbasis teknologi (*technology based economy*). Masing-masing tahap pembangunan sistem agribisnis tersebut mempunyai karakteristik serta tuntutan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan sistem agribisnis yang diperlukan pada setiap tahap juga berbeda-beda.

Aspek penting lainnya dalam kegiatan agribisnis, dari perspektif sosiologi, adalah organisasi. Konsep cara produksi dapat digunakan dalam hal ini. Untuk dapat dirujuk tiga tipe cara produksi yang tampaknya relevan dikenakan pada dunia pertanian Indonesia :

1. Produksi subsistem (*subsistence production*) : usaha pertanian oleh dan untuk rumah tangga petani.
2. Produksi komersial (*petty commodity production*) : usaha pertanian atau diluar pertanian skala kecil oleh rumah tangga untuk pasar.
3. Produksi kapitalis (*capitalist production*) : usaha pertanian atau diluar pertanian skala menengah hingga besar oleh perusahaan untuk pasar.

2.4 Operasional Agribisnis

Agribisnis berasal dari kata agri dan bisnis. Agri berasal dari bahasa Inggris, *agricultural* (pertanian). Bisnis berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kegiatan operasional Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Kegiatan operasional Agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistem sebagai berikut :

- a. **Subsistem agribisnis hulu** (*upstream agribusiness*) atau *off-farm*, yaitu kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit.

Contoh:

- Industri pembibitan tumbuhan dan hewan,
- Industri agrokimia (pupuk, pestisida, dan obat-obatan),

- Industri agro otomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.

b. **Subsistem produksi/usahatani** (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.

Contoh :

- Usaha tanaman pangan dan hortikultura,
- Perkebunan,
- Tanaman Obat,
- Peternakan,
- Perikanan, dan
- Kehutanan.

c. **Subsistem agribisnis hilir** (*down-stream agribusiness*) atau *off-farm* yaitu berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.

Contoh:

- Produk makanan dan minuman,
- Industri serat alam,
- Industri bio-farmaka, dan
- Industri agro-wisata dan estetika.

d. **Subsistem lembaga penunjang** (*off-farm*) yaitu seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).

Contoh

- Distribusi,
- Konsumsi,
- Promosi, dan
- Informasi pasar.

2.5 Pengertian Industri

Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.

2.5.1 Beberapa Konsep dan Definisi

1. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan industri adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).
2. Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapatkan imbalan sebagai balas jasa (upah maklon).

3. Pengelompokan industri pengolahan biasanya didasarkan pada jumlah tenaga kerja yaitu: Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Mikro. Dalam Berita Resmi Statistik (BRS) ini, hanya menyajikan data industri besar dan sedang.
4. Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.
5. Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang.
6. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.
7. Industri Mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang.

2.5.2 Jenis / macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku

1. Industri ekstraktif

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.

Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

2. Industri nonekstraktif

Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

3. Industri fasilitatif

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.

Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

2.5.3 Golongan / Macam Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal

1. Industri padat modal

Adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya

2. Industri padat karya

Adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

2.5.4 Jenis-jenis/Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi atau Penjenisannya

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986

1. Industri kimia dasar, contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb.
2. Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll.
3. Industri kecil, contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll.
4. Aneka industri, misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

2.5.5 Jenis-jenis / Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1. Industri rumah tangga, Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri kecil, Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
3. Industri sedang atau industri menengah, Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri besar, Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

2.5. Pembagian / Penggolongan Industri Berdasarkan Pemilihan Lokasi

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industry*), adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (*man power oriented industry*), adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industry*), adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan

baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

2.5.7 Macam-Macam Jenis Industri Berdasarkan Produktivitas Perorangan

1. Industri primer, adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder, industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
3. Industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

2.5.8 Kriteria Industri Menurut Beberapa Lembaga

1. Meneg Koperasi dan UKM

- Usaha Kecil (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil)
 - Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.
- Usaha Menengah (Inpres 10/1999) Aset Rp.200 Juta – Rp.10 milyar.

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

- Usaha Mikro Pekerja lebih kecil dari 4 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
- Usaha Kecil jumlah Pekerja 5-19 orang.
- Usaha Menengah jumlah Pekerja 20-99 orang.

3. Bank Indonesia

- Usaha Mikro
 - (SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998) Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga. Sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.
- Usaha Kecil
 - (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil) Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1

milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.

- Usaha Menengah

(SK Dir BI No.30/45/Dir/UK tgl 5 Jan 1997) Aset lebih kecil dari Rp.5 milyar untuk sektor industri. Aset lebih kecil dari Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non-industri manufacturing. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.3 milyar

4. Bank Dunia

- Usaha Mikro jumlah Pekerja lebih kecil dari 20 orang
- Kecil-Menengah jumlah Pekerja 20-150 orang Aset lebih kecil dari US\$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan

5. Dep. Perindustrian

- Industri Kecil

Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.

Tabel 2.1
Penentuan Jenis Industri menurut Dep. Perindustrian

No	Jenis Industri	
	Industri kecil/ Rumah Tangga	Industri Besar
1	Modal Produksi Tidak Terlalu Besar	Modal Produksi Besar
2	Menggunakan Mesin-mesin Sederhana	Menggunakan Mesin-mesin Modern
3	Tidak Membutuhkan Lahan yang Luas	Membutuhkan Lahan yang Luas

Sumber : Departemen Perindustrian Tahun 2011

2.5. Skala usaha menurut BPS yang diujicobakan di lingkungan Depperind

1. Industri dan Dagang Mikro : 1-4 orang Industri dan Dagang Kecil : 5 – 19 orang Industri dan Dagang Menengah : 20-99 org
2. Industri Menengah (Konsensus Depperindag-BPS) Omzet penjualan antara Rp.1 milyar hingga Rp.50 milyar

2.5.10 Dampak Positif dan Negatif dari Pembangunan Industri

2.5.10.1 Dampak Positif

1. Menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran.
2. Perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah.
4. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk.
5. Mengurangi ketergantungan Negara pada luar negeri.
6. Dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan.

2.5.10.2 Dampak Negatif

1. Limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara.
2. Asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara.
3. Akibat dari pencemaran, banyak menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain-lain.

2.5.11 Perindustrian Indonesia

Tujuan dari negara Indonesia pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata. Guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut, pemerintah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya untuk mendorong laju perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

Perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan di zaman sekarang.

Karena sebegitu pentingnya sektor industri ini bagi perekonomian Indonesia, maka sudah tentu harus dibentuk satu aturan hukum yang berguna untuk mengatur regulasi di wilayah sektor Industri ini.

Cabang-cabang industri Indonesia

Berikut adalah berbagai industri yang ada di Indonesia:

1. Makanan dan minuman
2. Tembakau
3. Tekstil
4. Pakaian jadi

5. Kulit dan barang dari kulit
6. Kayu, barang dari kayu, dan anyaman
7. Kertas dan barang dari kertas
8. Penerbitan, percetakan, dan reproduksi
9. Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar dari nuklir
10. Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
11. Karet dan barang-barang dari plastik
12. Barang galian bukan logam
13. Logam dasar
14. Barang-barang dari logam dan peralatannya
15. Mesin dan perlengkapannya
16. Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data
17. Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
18. Radio, televisi, dan peralatan komunikasi
19. Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam
20. Kendaraan bermotor
21. Alat angkutan lainnya
22. Furniture dan industri pengolahan lainnya

Klasifikasi berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986

- Industri kimia dasar : misalnya industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb.
- Industri mesin dan logam dasar : misalnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll.
- Industri kecil : industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll.
- Aneka industri : industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

2.5.12 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perindustrian di Indonesia

Arti penting perindustrian terhadap perkembangan perekonomian dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi yang termaktub dalam GBHN 2002-2004: "Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan,

pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan SDA dan SDM dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.”

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya mendorong laju perkembangan perindustrian di Indonesia. Baik kegiatan di bidang penyusunan regulasi yang diperkirakan dapat mendorong laju perkembangan perindustrian Indonesia, maupun kebijakan riil melalui pemberdayaan departemen yang terkait.

Sasaran pembangunan sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya ialah memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Upaya Departemen Perindustrian selaku pengemban tugas pembinaan industri nasional untuk memperluas akses pasar produk dalam negeri mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah pasar yang selama ini sulit ditembus produk dalam negeri seperti pada pengadaan barang dan jasa di sektor industri migas dan pembangunan infrastruktur listrik, kini mulai terbuka.

Hal ini juga nanti akan berkaitan dengan penyediaan informasi pasar mengenai peluang pasar internasional dan hasil-hasil kerjasama industri dan perdagangan kepada dunia usaha, khususnya usaha kecil menengah. Selain itu, mendorong untuk meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri.

Di bidang regulasi, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Dalam upaya penyusunan regulasi, pemerintah telah menghasilkan suatu produk hukum yang khusus mengatur hal-hal memiliki

sangkut paut dengan industri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Persoalan yang muncul kemudian, apakah perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut telah mampu menjawab perkembangan perindustrian dan perekonomian yang ada pada masa sekarang? Untuk itu perlu dibahas juga soal efektivitas dari Undang-Undang tentang perindustrian. Tidak menutup kemungkinan pula jika didapati adanya kelemahan dari Undang-Undang tersebut, untuk dapat dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tersebut.

